PROFIL PERUSAHAAN
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

1	Nama Perusahaan	:	PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk Unit Syariah
2	Alamat lengkap	:	Sinarmas MSIG Tower Lt. 6, Jl Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta Selatan
3	No. Telepon dan Fax.	:	021-50609999 dan Fax. 021-5060 8899
4	E-mail	:	cs@msiglife.co.id
5	NPWP	:	01.391.150.8-073.000
6	No. & Tanggal Izin Usaha	:	KEP-649/KM.10/2011 Tanggal 3 Agustus 2011
7	a. Jumlah Cabang/ Perwakilan b. Jumlah Tertanggung	: :	17 Kantor Pemasaran dan 32 Agency Kantor Mandiri 334,140
8	Auditor Eksternal	:	Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)
9	Pemegang Saham		

Nama Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali	Kepemilikan Saham	
		Rupiah	Persentase
Mitsui Sumitomo Insurance Co, Ltd	Mitsui Sumitomo Insurance Co, Ltd	Rp 168.000.000.000,-	80%
PT Sinarmas Multiartha, Tbk.		Rp 26.250.000.000,-	12.5%
Publik		Rp 15.750.000.000,-	7.5%
Total		Rp 210.000.000.000,-	100%

10 Pengendali : Mitsui Sumitomo Insurance Co, Ltd

11 Direksi dan Komisaris

Nama Direksi	Jabatan	Nama Komisaris	Jabatan
Wianto	Presiden Direktur	Indra Widjaja	Presiden Komisaris
Satoshi Shiratani	Wakil Presiden Direktur	Toshinari Tokoi	Komisaris
Herman Sulistyo	Direktur	Hideaki Nomura	Komisaris
Tomoyuki Monden	Direktur	Ardhayadi Mitroatmodjo	Komisaris Independen
Andrew Bain	Direktur	Sidharta Akmam	Komisaris Independen
Ken Terada	Direktur	Nazly Parlindungan Siregar	Komisaris Independen

12 PIC Laporan

Nama	Jabatan	Email	Nomor Telepon/HP
Johana M Louhenapessy	Compliance & Investigation Division Head	Johana.Louhenapessy@msiglife.co.id	021-5059 7777/08812343398

13 Tenaga Dengan Kualifikasi Ahli

Nama	Kualifikasi dan No. Registrasi	Lembaga Pemberi Kualifikasi	Bidang Keahlian
Yulia Andri Hartiana Dwi P	AAIJ - 98010034	AAMAI	Ahli Asuransi Jiwa
Ladiyana Prihantini	AWP - 2000050427	LSPK Indonesia	Ahli Asuransi Jiwa Syariah
Ferventika Sundah*	FSAI – 201110924	PAI	Aktuaris Perusahaan
Wakhidah Muslikhah**	FSAI – 9910293	PAI	Aktuaris Perusahaan
Hadi Setiawan	WMI-001938	TICMI	Investasi
Sari Yuliana	WMI-000798	TICMI	Investasi

* Diberhentikan sebagai Aktuaris Perusahaan per tanggal 14 Agustus 2023 berdasarkan surat OJK nomor S-386/PD.021/2023

** Menjabat sebagai Aktuaris Perusahaan sejak 5 Desember 2023 menggantikan Ferventika Sundah berdasarkan surat OJK nomor S-1427/PD.021/2023

14 Jumlah Tenaga Kerja (termasuk Direksi/Pengurus) : 559

15 Jumlah Agen
- a. Badan Hukum : -
- b. Perorangan : 233

16 Jumlah Pialang : 19

Jakarta, 26 April 2024

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk Unit Syariah

PT MSIG LIFE INSURANCE INDONESIA TBK KANTOR PUSAT

Wianto
Presiden Direktur

Herman Sulistyo
Direktur

I. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

a. Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa serta keputusan yang dihasilkan pada masing-masing RUPS

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Peserta	Keputusan RUPS	Nomor Akta Notaris	Ket
1.	27 Juni 2023	1. Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; 3. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2023;	1.680.077.310 pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 80% dari total 2.100.000.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan	**Mata Acara Rapat Pertama** 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global) sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. 00558/2.1032/AU.1/08/0240-1/1/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; dan 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perusahaan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2022.	- Akta No. 57 tanggal 27 Juni 2023 (Berita Acara RUPS Tahunan) - Akta No. 59 tanggal 27 Juni 2023 (Pernyataan Keputusan Rapat tentang pengangkatan kembali pengurus Perusahaan).	Seluruh keputusan Rapat sudah dilaksanakan oleh Perseroan

		4. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2023; dan 5. Pengangkatan kembali Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (sebagaimana disetujui oleh Komite Nominasi dan Remunerasi).		**Mata Acara Rapat Kedua** 1. Menetapkan bahwa sesuai dengan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global), laba bersih Perusahaan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp367.773.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) ("Laba Bersih 2022"); 2. Menetapkan penggunaan laba sebagai berikut: a. Menetapkan sejumlah Rp4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dari sisa Laba Bersih 2022 yang belum dibagikan dan belum ditentukan penggunaannya sebagai tambahan cadangan umum Perusahaan; b. Sebesar Rp371.700.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) (atau sebesar Rp177,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) per saham) yang berasal dari Laba Bersih 2022 dan akumulasi sisa laba tahun sebelumnya akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham. Jumlah dividen tunai tersebut setara dengan 101% dari Laba Bersih 2022; c. Atas pembayaran dividen tunai tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:		

				i. Dividen tunai untuk tahun buku 2022 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi; ii. Atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2022, Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; dan iii. Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2022, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bursa Efek Indonesia, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dan selanjutnya menyampaikan laporan dan/atau meminta persetujuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

3. Jadwal Pembagian Dividen

No	Uraian	Tanggal
1	Laporan Pembagian Dividen Tunai kepada Bursa Efek Indonesia	4 Juli 2023
2	Pengumuman Pembagian Dividen Tunai	4 Juli 2023
3	Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	10 Juli 2023
4	Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	11 Juli 2023
5	Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	12 Juli 2023
6	Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	13 Juli 2023
7	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (*Recording Date*)	12 Juli 2023
8	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022	28 Juli 2023

Mata Acara Rapat Ketiga

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2023 dengan

				memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan; dan 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji atau honorarium, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan. **Mata Acara Rapat Keempat** 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan proses seleksi Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang masih berlangsung dengan kriteria: Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan merupakan pihak yang independen dan profesional untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan memerhatikan rekomendasi dari Komite Audit; dan 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku**.**		

				Mata Acara Rapat Kelima 1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan yang berlaku efektif terhitung sejak RUPS Tahunan pada tahun 2023 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kedua yang diselenggarakan pada tahun 2025, dengan susunan sebagai berikut: a. Indra Widjaja selaku Presiden Komisaris; b. Toshinari Tokoi selaku Komisaris; c. Hideaki Nomura selaku Komisaris; d. Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Komisaris Independen; e. Sidharta Akmam selaku Komisaris Independen; f. Herman Sulistyo selaku Direktur; g. Andrew Bain selaku Direktur; h. Endy Muhammad Astiwara selaku ketua Dewan Pengawas Syariah; dan i. Ahmadi Sukarno selaku anggota Dewan Pengawas Syariah. 2. Memberikan ratifikasi dan penegasan atas seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Indra Widjaja, Toshinari Tokoi, Hideaki Nomura, Ardhayadi Mitroatmodjo, Sidharta Akmam, Herman Sulistyo, Andrew Bain, Endy Muhammad Astiwara, Ahmadi Sukarno sejak ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2021 sampai dengan ditutupnya rapat ini; 3. Untuk selanjutnya susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Perusahaan menjadi sebagai berikut:		

				Direksi Presiden Direktur: Wianto Wakil Presiden Direktur: Satoshi Shiratani Direktur: Herman Sulistyo Direktur: Tomoyuki Monden Direktur: Andrew Bain Direktur: Ken Terada **Dewan Komisaris** Presiden Komisaris: Indra Widjaja Komisaris: Toshinari Tokoi Komisaris: Hideaki Nomura Komisaris Independen:Ardhayadi Mitroatmodjo Komisaris Independen: Sidharta Akmam Komisaris Independen:Nazly Parlindungan Siregar **Dewan Pengawas Syariah** Ketua : Endy Muhammad Astiwara Anggota : Ahmadi Sukarno 4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Chief Compliance, Legal & Corporate Secretary untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan pengurus Perusahaan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
2	27 Juni 2023	1. Persetujuan atas perubahan Pasal 1 Ayat (1) Anggaran Dasar Perusahaan mengenai	1.680.077.310 pemegang saham dan kuasa pemegang saham	**Mata Acara Rapat Pertama** 1. Menyetujui perubahan nama Perusahaan yang semula bernama PT Asuransi Jiwa	- Akta No. 58 tanggal 27 Juni 2023 (Berita Acara RUPS Luar Biasa)	Seluruh keputusan Rapat sudah dilaksanakan oleh Perseroan

		nama dan tempat kedudukan; dan 2. Persetujuan atas perubahan logo Perusahaan.	yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 80% dari total 2.100.000.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan.	Sinarmas MSIG Tbk menjadi PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk; 2. Menyetujui perubahan alamat kantor pusat Perusahaan semula berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Wisma Eka Jiwa Lt. 8-9, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat 10730 menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan beralamat di Sinarmas MSIG Tower Lt. 6, Jl. Jend. Sudirman Kav 21, Jakarta Selatan 12920; 3. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan pada Pasal 1 Ayat (1) dengan mengubah nama Perusahaan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk menjadi PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk serta mengubah tempat kedudukan yang semula berkedudukan di Jakarta Pusat (Wisma Eka Jiwa) menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan (Sinarmas MSIG Tower); dan 4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Chief Compliance, Legal & Corporate Secretary untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan rapat ini ke dalam akta notaris, menyatakan kembali keseluruhan Anggaran Dasar serta mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	- Akta No. 60 tanggal 27 Juni 2023 (Pernyataan Keputusan Rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan)	

				Mata Acara Kedua Rapat Menyetujui perubahan logo Perusahaan serta penyesuaian logo baru dalam seluruh dokumen internal maupun eksternal Perusahaan, termasuk melakukan keterbukaan informasi, menyampaikan pelaporan kepada regulator terkait, serta menginformasikan perubahan logo Perusahaan kepada para pemangku kepentingan.		

b. Direksi

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi

No.	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan Oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir Dan Gelar Profesi	Uji Kemampuan Dan Kepatutan				
1	Wianto	Presiden Direktur	Sarjana Akuntansi – Universitas Nommensen	Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-23/KDK.05/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Wianto tertanggal 8 Juli 2020	Diangkat Kembali pada tanggal 22 Juni 2022 (Akta No. 70 tanggal 22 November 2022)	2 tahun	Indonesia	Indonesia
2	Satoshi Shiratani	Wakil Presiden Direktur	Sarjana Ekonomi - Hitotsubashi University	Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-24/KDK.05/2020	25 Maret 2022 (Akta No. 44 tanggal 22 Maret 2022)	2 tahun	Jepang	Indonesia

				tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Satoshi Shiratani tertanggal 8 Juli 2020.				
3	Herman Sulistyo	Direktur	Sarjana Matematika - Universitas Indonesia	Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-28/KDK.05/2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Herman Sulistyo tertanggal 23 April 2018	Diangkat Kembali pada tanggal 27 Juni 2023 (Akta No. 59 tanggal 27 Juni 2023)	2 tahun	Indonesia	Indonesia
4	Tomoyuki Monden	Direktur	Master of Business Administration - University of Illinois	Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-25/KDK.05/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Tomoyuki Monden tertanggal 8 Juli 2020	Diangkat Kembali pada tanggal 22 Juni 2022 (Akta No. 70 tanggal 22 November 2022)	2 tahun	Jepang	Indonesia
5	Andrew Bain	Direktur	Magister Manajemen Retail – Universitas Pelita Harapan	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-316/NB.11/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan	Diangkat Kembali pada tanggal 27 Juni 2023	2 tahun	Indonesia	Indonesia

				dan Kepatutan atas nama Andrew Bain tertanggal 20 Mei 2021	(Akta No. 59 tanggal 27 Juni 2023)			
6	Ken Terada	Direktur	Bachelor of Business Administration dari Aoyama Gakuin University pada tahun 2006	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-353/NB.11/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Ken Terada tertanggal 21 Juni 2022	28 Juli 2022 (Akta No. 38 Tanggal 18 Agutus 2022)	2 tahun	Jepang	Indonesia

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1	Wianto	Presiden Direktur	22 Juni 2022	-
2	Satoshi Shiratani	Wakil Presiden Direktur	25 Maret 2022	-
3	Herman Sulistyo	Direktur	27 Juni 2023	-
4	Tomoyuki Monden	Direktur	22 Juni 2022	-
5	Andrew Bain	Direktur	27 Juni 2023	-
6	Ken Terada	Direktur	28 Juli 2022	-

3) Rangkap jabatan Direksi

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
Tidak Ada					

4) Frekuensi rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi			% Kehadiran
			Jumlah Rapat Fisik (Selama Menjabat)	Jumlah Kehadiran		
				Rapat Fisik yang dihadiri	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Wianto	Presiden Direktur	12	12	0	100%
2.	Satoshi Shiratani	Direktur	12	12	0	100%
		Wakil Presiden Direktur	12	12	0	100%
3.	Herman Sulistyo	Direktur	12	12	0	100%
4.	Tomoyuki Monden	Direktur	12	12	0	100%
5.	Andrew Bain	Direktur	12	12	0	100%
6.	Ken Terada	Direktur	12	12	0	100%

Catatan:

Rapat Direksi yang telah diadakan setiap bulan (12 kali) selama 2023, antara lain membahas, merekomendasikan dan menyetujui hal berikut ini:
1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Asuransi dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Semester II Tahun 2022 untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Komisaris;
2. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Asuransi dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Semester I Tahun 2023 untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Komisaris;
3. Jadwal Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, dan Rapat Dewan Komisaris bersama Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024 untuk diajukan kepada Dewan Komisaris;
4. Pembagian Dividen Perusahaan
5. Jadwal pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tahun 2023 serta Paparan Publik untuk diajukan kepada Dewan Komisaris;
6. Tema Laporan Tahunan 2022;
7. Kriteria Perfoma Indikator Perusahaan Tahun 2023;
8. Kebijakan dan Program untuk IT Security Risk Management;

9. Perubahan Krangka Acuan Komite Pendukung Direksi Tahun 2023, yaitu Komite Investasi dan Keuangan, Komite Produk dan Pemasaran, Komite Manajemen Risiko, serta Komite Teknologi Informasi dan Operasional;
10. Perubahan Piagam Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Komisaris;
11. Perubahan Panduan Umum Penyampaian Laporan dan Permohonan Persetujuan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Komisaris;
12. Pemantauan Saham Perusahaan di IDX;
13. Rencana Rebranding Nama dan Logo Perusahaan untuk diajukan kepada Dewan Komisaris;
14. Perpanjangan Kontrak Sewa Sinarmas MSIG Tower untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Komisaris;
15. Perubahan Pedoman Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Komisaris;
16. Pembahasan proses persiapan Rencana Bisnis 2024;
17. Pengajuan Rencana Bisnis 2024 ke Dewan Komisaris;
18. Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
19. Laporan Self-Assessment Perlindungan Konsumen untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris; serta
20. Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.

5) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								
			A		B		C		D		Ket: Indonesia/ Luar Negeri
			Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	
1.	Wianto	Presiden Direktur	Tidak ada								
2.	Satoshi Shiratani	Wakil Presiden Direktur									
3.	Herman Sulistyo	Direktur									
4.	Tomoyuki Monden	Direktur									
5.	Andrew Bain	Direktur									
6.	Ken Terada	Direktur									

6) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
		Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.	Wianto		✓			✓			✓			✓	
2.	Satoshi Shiratani		✓			✓			✓			✓	
3.	Herman Sulistyo		✓			✓			✓			✓	
4.	Tomoyuki Monden		✓			✓			✓			✓	
5.	Andrew Bain		✓			✓			✓			✓	
6.	Ken Terada		✓			✓			✓			✓	

Keterangan:
*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb
**) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ ipar,dsb

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
		Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.	Wianto		✓			✓			✓			✓	
2.	Satoshi Shiratani		✓			✓			✓			✓	

3.	Herman Sulistyo		✓			✓			✓			✓	
4.	Tomoyuki Monden		✓			✓			✓			✓	
5.	Andrew Bain		✓			✓			✓			✓	
6.	Ken Terada		✓			✓			✓			✓	

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb

**) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ ipar,dsb

c. Dewan Komisaris

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.	Indra Widjaja	Presiden Komisaris	Bachelor of Commerce - Nanyang University	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-191/BL/2007 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Indra Wijaya tertanggal 18 Juni 2007	Diangkat Kembali pada tanggal 27 Juni 2023 (Akta No. 59 tanggal 27 Juni 2023)	2 tahun	Indonesia	Indonesia
2.	Toshinari Tokoi	Komisaris	Sarjana Hukum dan Politik -	Keputusan Dewan Komisioner OJK	Diangkat Kembali pada tanggal 27 Juni 2023	2 tahun	Jepang	Jepang

			Universitas Keio, Jepang	Nomor: KEP-34/D.05/2013 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Toshinari Tokoi tertanggal 29 Mei 2013	(Akta No. 59 tanggal 27 Juni 2023)			
3.	Hideaki Nomura	Komisaris	Master of Business Administration - Hitotsubashi University	Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-91/KDK.05/2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Hideaki Nomura tertanggal 3 Oktober 2019	Diangkat Kembali pada tanggal 27 Juni 2023 (Akta No. 59 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat di hadapan)	2 tahun	Jepang	Jepang
4.	Ardhayadi Mitroatmodjo	Komisaris Independen	Master of Arts Development Banking - American University, Washington DC	Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-81/KDK.05/2013 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Ardhayadi Mitroatmodjo tertanggal 15 Agustus 2013	Diangkat Kembali pada tanggal 27 Juni 2023 (Akta No. 59 tanggal 27 Juni 2023)	2 tahun	Indonesia	Indonesia
5.	Sidharta Akmam	Komisaris Independen	Magister Sains Hubungan Internasional - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Indonesia	Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/KDK.05/2015 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama	Diangkat Kembali pada tanggal 27 Juni 2023 (Akta No. 59 tanggal 27 Juni 2023)	2 tahun	Indonesia	Indonesia

				Sidharta Akmam tertanggal 12 Februari 2015				
6	Nazly Parlindungan Siregar	Komisaris Independen	1. Master of Science in Taxation - Golden Gate University, California, USA 2. Bachelor of Science in Commerce, jurusan Akuntansi - Santa Clara University, California, USA.	Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-58/KDK.05/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Nazly Parlindungan Siregar tertanggal 23 September 2020	Diangkat Kembali pada tanggal 22 Juni 2022 (Akta No. 70 Tanggal 22 November 2022)	2 tahun	Indonesia	Indonesia

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
Tidak Ada				

3) Rangkap jabatan Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Indra Widjaja	Presiden Komisaris	1. Komisaris Utama	PT Asuransi Sinar Mas	Perusahaan Asuransi
			2. Komisaris Utama	PT AB Sinar Mas Multifinance	Perusahaan Pembiayaan
			3. Komisaris Utama	PT Sinar Mas Multifinance	Perusahaan Pembiayaan
			4. Komisaris Utama	PT Sinartama Gunita	Biro Administrasi Efek
			5. Komisaris Utama	PT KB Insurance Indonesia	Perusahaan Asuransi

2.	Hideaki Nomura	Komisaris	1. Senior General Manager	Mitsui Sumitomo Insurance, Co., Ltd.	Asuransi
			2. Senior General Manager	MS & AD Insurance Group Holdings Inc.	Asuransi
			3. Direktur	Max Financial Services	Asuransi
			4. Vice Chairman & Direktur	BOCOM MSIG Life Insurance	Asuransi
3.	Nazly Parlindungan Siregar	Komisaris Independen	1. Komisaris Independen	PT AIG Insurance Indonesia	Perusahaan Asuransi
			2. Partner	Assegaf Hamzah & Partners	Law Firm
			3. Komisaris Independen	PT Principal Asset Management Indonesia	Perusahaan Aset Manajemen
4	Ardhayadi Mitroatmodjo	Komisaris Independen	1. Komisaris Independen	PT Smart TBK	Plantation

4) Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi			% Kehadiran
			Jumlah Rapat Fisik (Selama Menjabat)	Jumlah Kehadiran		
				Rapat Fisik yang dihadiri	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Wianto	Presiden Direktur	12	12	0	100%
2.	Satoshi Shiratani	Direktur	12	12	0	100%
		Wakil Presiden Direktur	12	12	0	100%
3.	Herman Sulistyo	Direktur	12	12	0	100%
4.	Tomoyuki Monden	Direktur	12	12	0	100%
5.	Andrew Bain	Direktur	12	12	0	100%

6.	Ken Terada	Direktur	12	12	0	100%

Catatan:
Rapat Dewan Komisaris yang telah diadakan setiap bulan (12 kali) selama tahun 2023, antara lain telah mengeluarkan rekomendasi, evaluasi dan persetujuan sebagai Upaya perbaikan kinerja Perusahaan:

1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Asuransi dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Semester II Tahun 2022;
2. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Asuransi dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Semester I Tahun 2023;
3. Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Perusahaan;
4. Pembagian Dividen Perusahaan;
5. Laporan Keuangan Tahunan 2022 yang telah di audit oleh auditor eksternal;
6. Jadwal pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa serta Paparan Publik tahun 2023;
7. Laporan Triwulanan Tahun 2023 dari Komite Pendukung Dewan Komisaris, yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Perusahaan;
8. Laporan keuangan tahun 2022 yang telah diaudit oleh auditor eksternal;
9. Kriteria Performa Indikator (KPI) Tahun 2023;
10. Perubahan Capital Management Framework;
11. Kebijakan dan Program untuk IT Security Risk Management;
12. Panduan Umum Penyampaian Laporan dan Permohonan Persetujuan;
13. Perubahan Kerangka Kerja Komite Pendukung Dewan Komisaris Tahun 2023, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Perusahaan;
14. Perubahan Piagam Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
15. Pemantauan Saham Perusahaan di IDX;
16. Penerapan Manajemen Risiko sepanjang tahun 2023;
17. Penunjukkan Auditor Eksternal;
18. Rencana Rebranding Nama dan Logo Perusahaan;
19. Perpanjangan Kontrak Sewa Sinarmas MSIG Tower;
20. Rencana Bisnis Tahun 2024;
21. Peningkatan Internal Governance;
22. Literasi dan Inklusi Keuangan;
23. Laporan Self-Assessment Perlindungan Konsumen;
24. Menetapkan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
25. Perubahan Pedoman Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal;
26. Jadwal Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, dan Rapat Dewan Komisaris bersama Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024;
27. Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.

5) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi			% Kehadiran
			Jumlah Rapat (Selama Menjabat)	Jumlah Kehadiran		
				Rapat Fisik yang dihadiri	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Indra Widjaja	Presiden Komisaris	5	1	4	100%
2.	Toshinari Tokoi	Komisaris	5	1	4	100%
3.	Hideaki Nomura	Komisaris	5	1	4	100%
4.	Ardhayadi Mitroatmodjo	Komisaris Independen	5	1	4	100%
5.	Sidharta Akmam	Komisaris Independen	5	1	4	100%
6.	Nazly Parlindungan Siregar	Komisaris Independen	5	0	5	100%
7.	Wianto	Presiden Direktur	5	1	4	100%
8.	Satoshi Shiratani	Wakil Presiden Direktur	5	1	4	100%
9.	Herman Sulistyo	Direktur	5	1	4	100%
10.	Tomoyuki Monden	Direktur	5	1	4	100%
11.	Andrew Bain	Direktur	5	1	4	100%
12.	Ken Terada	Direktur	5	1	4	100%

6) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								
			A		B		C		D		Ket: Indonesia/ Luar Negeri
			Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	
1.	Indra Widjaja	Presiden Komisaris	Tidak ada								
2.	Toshinari Tokoi	Komisaris									
3.	Hideaki Nomura	Komisaris									
4.	Ardhayadi Mitroatmodjo	Komisaris Independen									
5.	Sidharta Akmam	Komisaris Independen									
6.	Nazly Parlindungan Siregar	Komisaris Independen									

7) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
		Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.	Indra Widjaja		✓			✓			✓			✓	
2.	Toshinari Tokoi		✓			✓			✓			✓	
3.	Hideaki Nomura		✓			✓			✓			✓	
4.	Ardhayadi Mitroatmodjo		✓			✓			✓			✓	
5.	Sidharta Akmam		✓			✓			✓			✓	
6.	Nazly Parlindungan Siregar		✓			✓			✓			✓	

Keterangan:
*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb
**) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ ipar,dsb

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
		Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.	Indra Widjaja		✓			✓			✓			✓	
2.	Toshinari Tokoi		✓			✓			✓			✓	
3.	Hideaki Nomura		✓			✓			✓			✓	
4.	Ardhayadi Mitroatmodjo		✓			✓			✓			✓	

5.	Sidharta Akmam		✓			✓			✓			✓	
6.	Nazly Parlindungan Siregar		✓			✓			✓			✓	

Keterangan:
*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb
**) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ ipar,dsb

d. Dewan Pengawas Syariah

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarga-negaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1	DR. H. Endy Mohammad Astiwara, MA	Ketua	Doktor Metodologi Hukum Islam Universitas Islam Negeri	Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-224/NB.1/2015 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Atas Nama Endy M. Astiwara tertanggal 10 Februari 2015	27 Juni 2023 (Berdasarkan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham, yang diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Tahunan Nomor 59 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta)	Hingga RUPS Tahunan Kedua sejak tanggal ditandatanganinya keputusan sirkuler	Indonesia	Indonesia

2	DR. H. Ahmadi Sukarno, Lc, M.Ag.	Anggota	Doktor Pendidikan Islam dari Universitas Ibnu Khaldun	Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-226/NB.1/2015 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Atas Nama Ahmadi Sukarno tertanggal 10 Februari 2015	27 Juni 2023 (Berdasarkan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham, yang diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Tahunan Nomor 59 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta)	Hingga RUPS Tahunan Kedua sejak tanggal ditandatanganinya keputusan sirkuler	Indonesia	Indonesia

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
Tidak Ada				

3) Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Endy M. Astiwara	Ketua Dewan Pengawas Syariah	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah	Mandiri Manajemen Investasi	Asset Management
			2. Ketua Dewan Pengawas Syariah	Sharia Multifinance Astra	Multifinance
			3. Anggota Dewan Pengawas Syariah	Astra Sedaya Finance	Finance
2.	Ahmadi Sukarno	Anggota Dewan Pengawas Syariah	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah	Bank Nano Syariah	Perbankan
			2. Ketua Dewan Pengawas Syariah	Aset Management Sinarmas	Asset Management

4) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (6 kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	DR. H. Endy Mohammad Astiwara, MA	Ketua	-	6	100%
2.	DR. H. Ahmadi Sukarno, Lc, M.Ag.	Anggota	-	6	100%

Resume Hasil Rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:
1. Pengaplikasian konsep Syariah pada perencanaan produk
2. Koordinasi departemen pendukung unit usaha syariah
3. Update dan Koordinasi UUS dan DPS, terkait dengan Update pencapaian YTD Feb 2023 dan RBC Tabarru'
4. Koordinasi departemen pendukung unit usaha syariah, memberikan beberapa informasi update kepada DPS pada rapat ke 4, 5 dan 6

e. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Komisaris Independen

1) Laporan kegiatan Dewan Komisaris (termasuk hasil pengawasan atas realisasi rencana bisnis)

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi
Berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir Desember 2023, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi beserta jajaran Pejabat Eksekutif telah mengelola, memimpin, dan berusaha membawa Perusahaan pada pencapaian yang baik, dengan mengedepankan perinsip kehati-hatian sesuai dengan arah dan tujuan strategis jangka menengah panjang. Kami mengapresiasi atas segala daya dan upaya maksimal yang telah dilakukan Direksi ditengah tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2023. Sesuai dengan perannya, Dewan Komisaris akan terus memberikan arahan, masukan dan motivasi sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan di masa depan. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut dengan "Perusahaan") telah berupaya melakukan berbagai langkah terbaik yang adaptif agar rencana bisnis yang telah disusun dapat berjalan dengan baik. Pada akhir Desember 2023, Perusahaan berhasil membukukan pendapatan premi bruto sebesar Rp2,8 triliun dengan kekuatan modal mencapai Rp7,5 triliun. Pendapatan premi Perusahaan masih mengalami perlambatan sejalan dengan usaha Perusahaan mengurangi produk dengan pembayaran *single premium* untuk mencapai bauran bisnis yang lebih sehat, memberikan nilai lebih bagi Perusahaan dan berkelanjutan. Selain itu, Perusahaan juga melakukan *shifting* produk yang lebih berfokus pada pengembangan produk tradisional sesuai dengan kebutuhan Nasabah. Dasar Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi tidak terlepas dari tingkat keberhasilan Direksi dalam merealisasikan *Key Performance Indicator* maupun Rencana Bisnis tahun 2023 yang meliputi aspek operasional, keuangan dan aspek lainnya yang berkaitan erat dengan keberlanjutan kegiatan usaha Perusahaan dalam jangka menengah maupun panjang. Dewan Komisaris secara reguler berperan aktif melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atas implementasi strategi dan rencana bisnis yang telah dijalankan oleh Direksi Perusahaan sepanjang semester II-2023 dengan ikut terlibat dalam rapat komite yang ada. Salah satu tujuan	. Kondisi ekonomi dan market yang fluktuatif akibat situasi ekonomi global yang belum stabil a) Merekomendasikan untuk melakukan diversifikasi bauran produk dengan mendorong kontribusi produk reguler yang lebih besar yang berorientasi kepada proteksi dan kesehatan (tradisional) sesuai dengan kebutuhan Nasabah. b) Merekomendasikan untuk menempatkan portofolio investasi dengan pemilihan instrument investasi yang selektif dan memperketat manajemen risiko. . Pemberlakuan penuh SEOJK PAYDI a) Memastikan infrastruktur telah memadai dan mendukung penjualan PAYDI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b) Merekomendasikan untuk melakukan evaluasi dan melakukan strategi penempatan investasi dengan menyesuaikan portofolio produk yang dipasarkan agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. . Meningkatnya biaya klaim rasio akibat pergeseran produk a) Merekomendasikan untuk memantau biaya klaim serta melakukan analisis klaim dari berbagai segmentasi atau pengelompokan. b) Merekomendasikan untuk melakukan review pricing product secara berkala terhadap produk yang menyumbang klaim rasio tinggi. . Disrupsi digital a) Merekomendasikan untuk melanjutkan pengembangan ekosistem digital guna mendukung aktivitas bisnis, operasional dan penjualan secara daring (online) maupun tatap muka (offline). b) Merekomendasikan untuk melakukan percepatan otomatisasi dan digitalisasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Nasabah. c) Merekomendasikan untuk memperketat sistem keamanan IT sebagai bentuk komitmen Forever Trusted bagi seluruh pemangku kepentingan. . Mencegah dan mengurangi kasus DUA dalam proses bisnis maupun operasional

dari pengawasan ini adalah memastikan bahwa strategi yang dijalankan berada pada jalur yang tepat tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta pengelolaan manajemen risiko yang terkontrol. Keseluruhan proses telah dilakukan dengan tetap mengedepankan kepentingan dan kebutuhan pemegang saham, nasabah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. a. Evaluasi Terhadap Realisasi Pendapatan Premi per Desember 2023 Sampai dengan akhir Desember 2023, Perusahaan berhasil membukukan Pendapatan Premi Bruto (GWP) sebesar Rp162 miliar untuk unit Syariah. Pencapaian ini masih di bawah yang target seiring dengan langkah yang ditempuh Perusahaan untuk mengurangi kontribusi premi dengan cara bayar sekaligus/ *single premium* untuk menciptakan bauran bisnis yang lebih sehat sehingga tercapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dewan Komisaris sangat mengapresiasi usaha dari Direksi atas langkah yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023 untuk membawa Perusahaan mencapai tujuan jangka menengah panjang GREAT 2025 ditengah berbagai tantangan yang dihadapi tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sepanjang tahun 2023, Direksi Perusahaan juga melanjutkan perbaikan transformasi pada tiga pilar utama yaitu *Expand to Grow, Excellence Services and Support*, dan *Solid Financial and Governance.* Pada pilar Expand to Grow, untuk memperluas segmen Nasabah retail, Perusahaan melanjutkan perluasan bisnis Agency dengan membuka 17 (tujuh belas) AKM baru, meluncurkan 8 (delapan) produk baru dan memperkuat kerjasama Bancassurance dengan menjalin kerjasama pemasaran produk baru dengan 3 (tiga) bank. Selain itu, Perusahaan juga telah memulai implementasi rebranding dengan mempekenalkan nama, logo dan alamat kantor pusat Perusahaan yang baru untuk memperkuat komitmen pelayanan dan perlindungan kepada Nasabah. Pada akhir tahun 2023, Perusahaan juga telah mengambil keputusan terkait spin-off unit syariah melalui transfer portofolio. Pada pilar Excellence Services and Support efisiensi proses bisnis dan operasional terus dikembangkan melalui berbagai pengembangan aplikasi lanjutan	Merekomendasikan untuk memperkuat Kontrol Internal dengan melakukan evaluasi dan perbaikan SOP secara menyeluruh, mengembangkan infrastruktur monitoring berbasis internal kontrol, menyediakan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) dan pemanfaatan teknologi digital, serta meningkatkan kesadaran atas Kode Etik, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Perusahaan melalui pelatihan yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan maupun mitra bisnis Perusahaan.

maupun baru serta data analisis untuk meningkatkan kualitas layanan dan interaksi dengan Nasabah. Pada pilar Solid Financial and Governance, Perusahaan melakukan optimasi penempatan portofolio investasi agar mencapai Laba Bersih yang maksimal disertai dengan penguatan tata kelola dan manajemen risiko agar dapat tumbuh berkelanjutan. Terkait pencapaian laba bersih Perusahaan tahun 2023, Dewan Komisaris telah meminta manajemen Perusahaan untuk memberikan perhatian khusus dan melakukan analisis mendalam, dengan harapan agar di tahun mendatang, Perusahaan dapat mencapai kinerja keuangan yang lebih baik b. Evaluasi Terhadap Penerapan Tata Kelola per Desember 2023 Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance – GCG) merupakan hal fundamental yang selalu dijaga oleh Perusahaan. Prinsip-prinsip GCG, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran adalah nilai dasar yang dijaga dalam praktik manajemen dan pengawasan yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Sejak Januari hingga akhir Desember 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap aktivitas manajemen Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi secara rutin, dan berkelanjutan. Komunikasi yang efektif, rutin dan komprehensif dibangun dengan baik melalui 5 (lima) kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris – Direksi. Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha syariah dengan prinsip syariah, sejak Januari hingga akhir Desember 2023, Dewan Komisaris telah mengadakan 2 (dua) kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris – Dewan Pengawas Syariah. Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris telah didukung oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Perusahaan.	

c. Evaluasi Terhadap Realisasi Profil Risiko per Desember 2023
Berdasarkan hasil evaluasi laporan penilaian faktor profil risiko Unit Syariah, peringkat komposit tingkat risiko Unit Syariah untuk posisi per 31 Desember 2023 adalah peringkat **2 (dua)** atau **sedang rendah**. Penilaian faktor profil risiko Unit Syariah merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Penilaian risiko inheren Unit Syariah ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain:

a. Strategi bisnis,
b. Karakteristik bisnis,
c. Kompleksitas Unit Syariah,
d. Kondisi Unit Syariah, dan
e. Kondisi makro ekonomi.

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu:

a. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS,
b. Kecukupan kebijakan, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko,
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan
d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Unit Syariah menetapkan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.05/2021 yaitu risiko strategis, operasional, asuransi, kredit, pasar, likuiditas, hukum, kepatuhan dan reputasi.

d. Evaluasi Terhadap Realisasi Rentabilitas per Desember 2023
Sampai dengan akhir Desember 2023, pendapatan kontribusi unit syariah masih berada di belakang target, yaitu hanya mencapai 58%, sedangkan Pendapatan hasil investasi unit Syariah mencapai 36%.

e. Evaluasi Terhadap Realisasi Permodalan per Desember 2023 Dari sisi permodalan hingga akhir Desember 2023, Perusahaan tumbuh kuat pada posisi Risk Based Capital (RBC) 2.220% untuk Syariah Dana Perusahaan, telah melampaui batas yang diwajibkan oleh regulator sebesar 120%. Dengan kondisi tersebut, Perusahaan memiliki keuangan yang kuat dan sehat untuk mendukung kelangsungan bisnis dan pelaksanaan strategi jangka panjang.	

2) Laporan kegiatan Komisaris Independen

Komisaris Independen sebagai bagian dari Dewan Komisaris Perusahaan melaksanakan fungsi dan tanggung jawab pengawasan terhadap kinerja Direksi dan memastikan bahwa strategi yang dijalankan berada pada jalur yang tepat tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta pengelolaan manajemen risiko yang terkontrol dengan tetap mengedepankan kepentingan dan kebutuhan pemegang saham, nasabah, karyawan dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja Direksi Perusahaan sepanjang tahun 2023, Perusahaan berhasil membukukan Pendapatan Premi Bruto (GWP) unit Syariah sebesar Rp 162 miliar serta mencapai pertumbuhan kuat pada posisi RBC 220% untuk unit Syariah, telah melampaui batas yang diwajibkan oleh regulator sebesar 120%.

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah berhasil meluncurkan 8 (delapan) produk unit Konvensional, yaitu 2 (dua) SPUL, 1 (satu) Medical, 1 (satu) whole life, 1 (satu) retirement plan dan 3 (tiga) rider sebagai bentuk inovasi produk guna memenuhi kebutuhan nasabah dalam menghadapi tantangan diberlakukannya SEOJK PAYDI (SEOJK No.5/SEOJK.05/2022) pada bulan Maret 2023.

Perusahaan secara konsisten menjalankan rencana kerja pengembangan struktur organisasi untuk mendukung pencapaian strategi GREAT 2025 yang bertumpu pada 3 (tiga) pilar yaitu, Expand to Grow, Excellent Service & Support dan Solid Financial & Governance. Pengembangan sistem Teknologi Informasi terus dilakukan dalam rangka transformasi digital serta dukungan atas rencana jangka menengah GREAT 2025 untuk meningkatkan layanan nasabah, tenaga pemasar serta tim operasional Perusahaan. Pengembangan proyek IT sepanjang 2023 berjalan sesuai target namun ada beberapa proyek yang mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pengembangan berjalan bersamaan dengan perubahan proses bisnis, perubahan ruang lingkup dan prioritas proyek serta penyesuaian strategi internal Perusahaan.

f. Komite-Komite

1) Komite di bawah Direksi

No.	Nama komite	Periode	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	Dasar Pengangkatan	Jumlah Rapat Komite dalam Setahun
1.	Komite Investasi dan Keuangan	2023	1. Wianto	Presiden Direktur | Anggota	Masa kerja tidak diatur karena melekat pada jabatan (Ex Officio)	Pedoman Kerja Komite Investasi dan Keuangan Perusahaan, yang terakhir kali diamandemen pada tanggal 20 Juni 2023	12 kali
			2. Satoshi Shiratani	Wakil Presiden Direktur | Ketua			
			3. Herman Sulistyo	Direktur | Anggota			
			4. Tomoyuki Monden	Direktur | Anggota			
			5. Ken Terada	Direktur | Anggota			
			6. Tju Cunardi	Chief Actuarial | Anggota			
			7. Furqon Wirawan Damanik	Finance & Accounting Head | Anggota			
			8. Laurencia Wardhana	Corporate Planning & Performance Management Head | Anggota			
			9. Hadi Setiawan	Investment Head | Anggota			
			10. Wakhidah Muslikhah	Valuation and Reinsurance Head | Anggota			
			11. Vito Shadiq	Product Pricing Head | Anggota			
			12. Vaji Vitrada Nasution	Internal Audit Head | Anggota			

2.	Komite Teknologi Informasi & Operasional	2023	1. Andrew Bain	Direktur | Ketua	Masa kerja tidak diatur karena melekat pada jabatan (Ex Officio)	Pedoman Kerja Komite Teknologi Informasi dan Operasional Perusahaan, yang terakhir kali diamandemen pada tanggal 20 Juni 2023	12 kali
			2. Tomoyuki Monden	Direktur | Anggota			
			3. Herman Sulistyo	Direktur | Anggota			
			4. Ken Terada	Direktur | Anggota			
			5. Inasari Andayani Atmodjo	Chief Partnership Distribution | Anggota			
			6. Renova Siregar	Chief Compliance, Legal & Corporate Secretary | Anggota			
			7. Lukman Auliadi	Chief Customer & Marketing Officer (Caretaker)| Anggota			
			8. Novelita Siregar	Chief Human Capital Officer | Anggota			
			9. Bong Himmia	Information Technology Head | Anggota			
			10. Fandi Arrya Permana	IT Security & Governance Head | Anggota			
			11. Yulia Andri Hartiana	Operation Development & Control Head | Anggota			
			12. Anita Junianti	Customer Care Head | Anggota			
			13. Johana Louhenapessy	Compliance Head | Anggota			
			14. Leony Samosir	Legal & Corporate Secretary Head | Anggota			
			15. Troy Steve Kipuw	Risk Management Head | Anggota			

No.	Nama komite	Periode	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	Dasar Pengangkatan	Jumlah Rapat Komite dalam Setahun
3.	Komite Produk dan Pemasaran	2023	1. Ken Terada	Direktur | Ketua	Masa kerja tidak diatur karena melekat pada jabatan (Ex Officio)	Pedoman Kerja Komite Produk dan Pemasaran Perusahaan, yang terakhir kali diamandemen pada tanggal 20 Juni 2023	4 kali
			2. Wianto	Direktur | Anggota			
			3. Satoshi Shiratani	Direktur | Anggota			
			4. Herman Sulistyo	Direktur | Anggota			
			5. Andrew Bain	Direktur | Anggota			
			6. Tomoyuki Monden	Direktur | Anggota			
			7. Tju Cunardi	Chief Actuarial | Anggota			
			8. Lukman Auliadi	Chief Customer & Marketing Officer (Caretaker)| Anggota			
			9. Vito Shadiq	Product Pricing Head | Anggota			
			10. Indra Persada	Product Management Head | Anggota			
			11. Arlina Tridewani Benyamin	Customer Experience & Engagement Head |Anggota			
			12. Bong Himmia	Information Technology Head | Anggota			
			13. Johana Louhenapessy	Compliance Head | Anggota			
			14. Leony Samosir	Legal & Corporate Secretary Head | Anggota			
			15. Ratna Kencana Putra	Partnership & Business Development Head | Anggota			
			16. Ferry Tjong	Agency Business Head | Anggota			

No.	Nama komite	Periode	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	Dasar Pengangkatan	Jumlah Rapat Komite dalam Setahun
			17. Mikha S. Wirianto	Preferred Bank Partner (BSIM) Head | Anggota			
			18. Hugeng Bawono	KB Bukopin and Jatim Bank Partner Head | Anggota			
			19. Ayu Meidyawati	Corporate Business and DPLK Head | Anggota			
			20. Ladiyana Prihantini	Sharia Unit Head | Anggota			
			21. Vaji Vitrada Nasution	Internal Audit Head | Anggota			
			22. Wakhidah Muslikhah	Aktuaris Perusahaan | Anggota			

No.	Nama komite	Periode	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	Dasar Pengangkatan	Jumlah Rapat Komite dalam Setahun
4.	Komite Manajemen Risiko	2023	1. Tomoyuki Monden	Direktur | Ketua	Masa kerja tidak diatur karena melekat pada jabatan (Ex Officio)	Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko Perusahaan, yang terakhir kali diamandemen pada tanggal 20 Juni 2023	4 kali
			2. Wianto	Presiden Direktur | Anggota			
			3. Satoshi Shiratani	Wakil Presiden Direktur | Anggota			
			4. Andrew Bain	Direktur | Anggota			
			5. Renova Siregar	Chief Compliance, Legal & Corporate Secretary | Anggota			
			6. Tju Cunardi	Chief Actuarial | Anggota			

			7. Novelita Siregar	Chief Human Capital Officer | Anggota			
			8. Troy Steve Kipuw	Risk Management Head | Anggota			
			9. Johana Louhenapessy	Compliance Head | Anggota			
			10. Leony Samosir	Legal & Corporate Secretary Head | Anggota			
			11. Bong Himmia	Information Technology Head | Anggota			
			12. Fandi Arrya Permana	IT Security & Governance Head | Anggota			
			13. Hadi Setiawan	Investment Head | Anggota			
			14. Vaji Vitrada Nasution	Internal Audit Head | Anggota			
			15. Alief Yanisa	*Risk Management Manager* | Anggota			
			16. Fitriyana Maya Damayanti	Pension Fund Management / Pension Fund Caretaker | Anggota			
			17. Joelong	Pension Fund Management / Pension Fund Caretaker | Anggota			

No.	Nama komite	Periode	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	Dasar Pengangkatan	Jumlah Rapat Komite dalam Setahun
5.	Komite Sumber Daya Manusia	2023	1. Novelita Siregar	Chief Human Capital Officer |Ketua	Masa kerja tidak diatur karena melekat pada	Pedoman Kerja Komite Sumber Daya Manusia, yang terakhir kali diamandemen	12 kali
			2. Wianto	Presiden Direktur | Anggota			
			3. Satoshi Shiratani	Wakil Presiden Direktur | Anggota			

No.	Nama komite	Periode	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	Dasar Pengangkatan	Jumlah Rapat Komite dalam Setahun
			4. Andrew Bain	Direktur | Anggota	jabatan (Ex Officio)	pada tanggal 21 Maret 2023	
			5. Tomoyoki Monden	Direktur | Anggota			
			6. Renova Siregar	Chief Compliance, Legal & Corporate Secretary | Anggota			

2) Komite di bawah Dewan Komisaris

No.	Nama komite	Periode	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	Dasar Pengangkatan	Jumlah Rapat Komite dalam Setahun
1.	Komite Audit	2023	1. Nazly Parlindungan Siregar	Ketua	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris	Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 20 Oktober 2020, Surat Keputusan No. 024/AJSMSIG-SK/XII/2022 Tentang Susunan Anggota Komite Audit dan Keputusan Rapat Dewan Komisaris	12 kali
			2. Okamoto Yoshiro*	Anggota	29 April 2021 sampai dengan RUPS Tahunan 2023		
			3. Adam Hartono**	Anggota	29 April 2021 sampai dengan RUPS Tahunan 2023		
			4. Karel Tjahjadi	Anggota	27 Juni 2023 sampai dengan RUPS Tahunan 2025		

			5. Bambang Santoso Marsoem	Anggota	27 Juni 2023 sampai dengan RUPS Tahunan 2025	Perusahaan No. 21/AJSMSIG-SK/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023	

* Menjabat sebagai anggota hingga 27 Juni 2023 dan digantikan Karel Tjahjadi Efektif mulai 27 Juni 2023.
**Menjabat sebagai anggota hingga 27 Juni 2023 dan digantikan Bambang Santoso Marsoem Efektif mulai 27 Juni 2023.

No.	Nama komite	Periode	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	Dasar Pengangkatan	Jumlah Rapat Komite dalam Setahun
2.	Komite Pemantau Risiko	2023	1. Sidharta Akmam	Ketua	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris	Surat Keputusan No. 004/AJSMSIG-SK/II/2023 Tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko	4 kali
			2. Toshinari Tokoi	Anggota	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris		
			3. Renova Siregar	Anggota	Masa kerja tidak diatur karena melekat pada jabatan (Ex Officio)		
			4. Troy Steve Kipuw	Anggota	Masa kerja tidak diatur karena melekat pada jabatan (Ex Officio)		

No.	Nama komite	Periode	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	Dasar Pengangkatan	Jumlah Rapat Komite dalam Setahun
3.	Komite Tata Kelola Perusahaan	2023	1. Toshinari Tokoi	Ketua	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris	Surat Keputusan No. 005/AJSMSIG-SK/II/2023 Tentang Susunan Anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan	5 kali
			2. Ardhayadi Mitroatmodjo	Anggota	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris		
			3. Nazly Parlindungan Siregar	Anggota	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris		
			4. Renova Siregar	Anggota	Masa kerja tidak diatur karena melekat pada jabatan (Ex Officio)		
4.	Komite Nominasi dan Remunerasi	2022	1. Sidharta Akmam	Ketua	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris	Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 Oktober 2020 dan Surat Keputusan No. 026/AJSMSIG-SK/XII/2022 Tentang Susunan Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi	6 kali
			2. Indra Widjaja	Anggota	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris		
			3. Toshinari Tokoi	Anggota	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris		

			4. Hideaki Nomura	Anggota	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris	PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk	
			5. Novelita Siregar	Anggota	Masa kerja tidak diatur karena melekat pada jabatan (Ex Officio)		

g. Penerapan fungsi auditor eksternal.

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Nama Kantor Akuntan Publik	Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)
2.	Nama Akuntan Publik	Hermawan Setiadi	Muhammad Kurniawan	Ignatius Yokajaya
3.	Periode Audit	2021	2022	2023
4.	Nomor RUPS	RUPST 2021: No. 21/V/2021	Akta No. 86 tanggal 22 Juni 2022	Akta No. 53 tanggal 27 Juni 2023

h. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah	Pegawai
Di atas Rp2 miliar	6			4
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar		1		16
Di atas Rp500juta s.d Rp1 miliar		1		43
Rp500juta ke bawah		4	2	490

Keterangan: *) yang diminta secara tunai

i. Alih Daya Pengelolaan Investasi

No	Jenis Investasi	Nama Perusahaan Alih Daya	Nilai Investasi	No. Perjanjian	% dari total Portofolio Investasi
1	Obligasi	PT Bahana TCW	74,006,028,779	No.396/AJSMSIG-LGL/PKS/UNK/IX/2022	32.55%
2	Obligasi	PT Panin Asset Management	16,507,925,500	No.370/AJSMSIG-LGL/PKS/UNK/VIII/2022	7.26%
3	Saham	PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk	73,888,489,200	Akta no.14 Tgl 12 Januari 2022	32.50%
4	Saham	PT Panin Asset Management	40,551,723,500	No.370/AJSMSIG-LGL/PKS/UNK/VIII/2022	17.84%
5	Deposito	PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk	3,500,000,000	Akta no.14 Tgl 12 Januari 2022	1.54%
	Deposito	PT Bahana TCW	18,900,000,000	No.396/AJSMSIG-LGL/PKS/UNK/IX/2022	8.31%
Total			245,979,767,102		100%

j. Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (*outsourcing*)

No	Fungsi yg dialihdayakan	Nama Pihak lain	Izin Usaha	Jangka waktu kontrak
1.	*Officeboy, Messenger, Security*	PT Pro Pacific	9120100722383	16 Juni 2023 – 15 Juni 2026
2	*Validation Call, Welcome Call & Collection Call*	PT Linksindo Makmur	91200061428230002	1 Juli 2022 – 30 Juni 2024
3	*Jasa Management Contact Center*	*PT Vads Indonesia*	9120407910442	9 Oktober 2023 – 8 Oktober 2024
4	*Employment Background Screening*	*PT Integrity Indonesia*	*8120315112923*	*9 November 2021 - 9 November 2025*
5	*IT Employee Contract Basis*	*PT Sigma Global Teknologi*	*1255000242468*	*21 September 21 (1 tahun & dapat diperbaharui)*

6	*IT Employee Contract Basis*	*PT Adi Consulting*	*8120000711794*	*5 maret 2021 (1 tahun & dapat diperbaharui)*
7	*IT Employee Contract Basis*	*PT. Inspiro*	*9120106632503*	*21 Agustus 2022 (1 tahun & dapat diperbaharui)*
8	*IT Employee Contract Basis*	*PT. Avows Technologies*	*8120000712005*	*17 April 2023 (1 tahun & dapat diperbaharui)*
9	*IT Employee Contract Basis*	*PT Accord Innovations Indonesia*	*9120119220296*	*12 Oktober 2021 (1 tahun & dapat diperbaharui)*
10	*IT Employee Contract Basis*	*PT Esha Parama Teknologi*	*9120202692304*	*22 Agustus 2022 (1 tahun & dapat diperbaharui)*
11	*IT Employee Contract Basis*	*PT Bumi Amartha Teknologi Mandiri*	*0220007300727*	*28 Maret 2023 (1 tahun & dapat diperbaharui)*
12	*IT Employee Contract Basis*	*PT MSBU KONSULTAN INDONESIA*	*0501220032919*	*15 Mei 2023 (1 tahun & dapat diperbaharui)*
13	*Proses penjaminan di Rumah Sakit Rekanan*	*PT. Administrasi Medika (AdMedika)*	*9120009271383*	*06 Juli 2021 sampai tidak terbatas*
14	*Proses penjaminan di Rumah Sakit Rekanan*	*PT. Prima Sarana Jasa (Global Excel Indonesia)*	*8120004772133*	*27 Juli 2022 sampai tidak terbatas*

k. Pengungkapan hal-hal penting lainnya Pengungkapan hal-hal penting lainnya

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal		✓	
2.	Transaksi material dengan pihak terkait**		✓	
3.	Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan Perasuransian		✓	

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
4.	Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi		✓	
5.	Informasi material lain mengenai Perusahaan Perasuransian		✓	
6.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan	✓		Fungsi kepatuhan dijalankan oleh Compliance Department yang merupakan bagian dari Divisi Compliance & Fraud Investigation
7.	Perusahaan memiliki auditor internal	✓		Perusahaan memiliki Internal Audit Department yang dikepalai oleh Head of Internal Audit
8.	Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko	✓		Fungsi manajemen risiko dijalankan oleh Risk Management Department yang dikepalai oleh Head of Risk Management
9.	Perusahaan memiliki fungsi/satuan kerja pengelolaan investasi	✓		Fungsi pengelolaan investasi dijalankan oleh Investment Department yang dikepalai oleh Head of Investment
10.	Perusahaan memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat PJK yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT	✓		Perusahaan telah memiliki Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) yang disahkan direksi berdasarkan SK Direksi No. 011/AJSMSIG-SK/IV/2020 dan sebagaimana dilakukan perubahan terkahir kali dengan SK Direksi No. 006/AJSMSIG-SK/IV/2022 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Implementasi Program Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pembaharuan Unit Kerja Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) PT Asuransi Jiwa Sinarmas Tbk.

*) pilih salah satu jawaban dengan membubuhkan tanda “√”

**) Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pengisian kuesioner Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan dilakukan oleh Perusahaan yang bersangkutan. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner dimaksud.

Cara Pengisian:

Secara Umum jawaban atas Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud terdiri dari 5 kriteria sebagai berikut (kecuali untuk jawaban yang membutuhkan kriteria berbeda) :

A= Perusahaan yang bersangkutan TIDAK MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud.

B= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan.

C= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan secara KONSISTEN.

D= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN namun BELUM DIUPDATE secara berkala.

E= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud dan kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN serta DIUPDATE secara berkala.

Penafsiran Hasil

Suatu penilaian diperlukan untuk menafsirkan angka yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Kuesioner ini, yang sebagian besar jawabannya adalah terdiri dari 5 (lima) skala mulai dari penilaian terendah (A/ Tidak), sampai dengan penilaian tertinggi (E/ Ya).

Khusus untuk jawaban " A/Tidak" pada kriteria penilaian yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan (bersifat wajib), diberikan angka minus.

Untuk kelompok Pertanyaan/Pernyataan yang dilewatkan karena "Tidak ada" dan yang bukan bersifat "tidak applicable", dalam penafsiran hasil harus tetap diperhitungkan dengan memberikan score yang sama dengan jawaban " A/Tidak ".

ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU

1.	Perusahaan memiliki Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.	Perusahaan memiliki Kebijakan Etika Bisnis yang antara lain meliputi :					
2.1.	Kebijakan umum yang mengarah kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.2.	Kebijakan bagi organ perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.3.	Kebijakan bagi pegawai	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.4.	Kebijakan bagi pemegang polis	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.5.	Kebijakan bagi mitra usaha	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.6.	Kebijakan bagi sesama perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.	Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang merupakan penjabaran Nilai-nilai Perusahaan dan Etika Bisnis	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.	Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang :					
4.1.	Benturan kepentingan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

4.2.	Pemberian hadiah dan donasi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.3.	Kepatuhan terhadap peraturan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.4.	Kerahasiaan informasi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.5.	Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

5. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perusahaan:

5.1.	Membuat pernyataan "tidak memiliki benturan kepentingan" terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang mengambil keputusan	**Tidak**	**Ya**
5.2.	Membuat pernyataan setiap tahun mengenai pelaksanaan pedoman perilaku yang ditetapkan perusahaan	**Tidak**	**Ya**
5.3.	Membuat pernyataan setiap tahunnya untuk tidak menerima dan atau memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan	**Tidak**	**Ya**

6.	Perusahaan melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal sendiri (ekuitas) secara benar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum maupun prinsip akuntansi yang berlaku khusus bagi perusahaan	**Tidak**	**Ya**

7.	Mempunyai sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, peraturan Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang berkaitan dengan Pemegang Polis yang menjamin perlindungan bagi Pelapor.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

I. ORGAN PERUSAHAAN

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1.	Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

2.	Kebijakan Perusahaan tentang penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	**A B C D E**
3.	Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS	**Tidak Ya**
4.	Penjelasan lengkap dan informasi tersebut meliputi hal-hal berikut ini:	
	4.1. Panggilan RUPS	**Tidak Ya**
	4.2. Informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS	**Tidak Ya**
	4.3. Tersedianya informasi di kantor pusat Perusahaan	**Tidak Ya**
	4.4. Komitmen diselenggarakannya RUPS secara transparan	**Tidak Ya**
	4.5. Pemberitahuan kepada setiap pemegang saham mengenai hasil RUPS	**Tidak Ya**
5.	Dalam pengambilan keputusan RUPS :	
	5.1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat telah lulus Fit and Proper Test bagi Perusahaan	**Tidak Ya**
	5.2. Mempertimbangkan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi atau fungsi yang menangani Nominasi dan Remunerasi dalam pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi	**A B C D E**
	5.3. Mempertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan	**A B C D E**
	5.4. Melakukan penetapan auditor eksternal	**Tidak Ya**
	5.5. Keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan wajar dari para pemangku kepentingan	**A B C D E**

5.6.	Memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan dalam hal pemberian bonus, tantiem, dan dividen	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

B. Dewan Komisaris dan Direksi

1. Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing telah melaksanakan hal-hal di bawah ini:

1.1.	Internal Control	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.2.	manajemen risiko	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.3.	imbal hasil (return) yang wajar bagi Pemegang Saham	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.4.	kebijakan yang terkait kepentingan stakeholders	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.5.	suksesi kepemimpinan dan kontinyuitas manajemen di semua lini organisasi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.6.	implementasi GCG	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

2. Dewan Komisaris dan Direksi bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut di bawah ini:

2.1.	Sasaran usaha Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.2.	Rencana jangka panjang perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.3.	Rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.4.	Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.5.	Kebijakan dalam menghindari segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.6.	Kebijakan dan metode penilaian Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.7.	Kebijakan dan metode penilaian unit-unit dalam perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

2.8.	Struktur organisasi pada tingkat eksekutif	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

C. Dewan Komisaris

1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

1.1.	Jumlah anggota Dewan Komisaris telah disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan	**Tidak**	**Ya**
1.2.	Dalam komposisi Dewan Komisaris termasuk komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen	**Tidak**	**Ya**
1.3.	Pengangkatan Komisaris Independen sesuai ketentuan yang berlaku	**Tidak**	**Ya**
1.4.	Dewan Komisaris terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi seperti *)		
	a. bidang asuransi	**Tidak**	**Ya**
	b. bidang keuangan	**Tidak**	**Ya**
	c. bidang manajemen	**Tidak**	**Ya**
1.5.	Mempunyai Komisaris Utusan, selain Komisaris Independen	**Tidak**	**Ya**
1.6.	Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai proses yang transparan berdasarkan alasan yang wajar dan diberi kesempatan membela diri	**Tidak**	**Ya**
1.7.	Tidak merangkap sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang	**Tidak**	**Ya**

	menyelenggarakan sebagian usaganya berdasarkan Prinsip Syariah yang sama		
1.8.	Tidak merangkap jabatan lebih dari 4 (empat) Lembaga Jasa Keuangan lainnya	**Tidak**	**Ya**
1.9.	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota DPS pada Perusahaan Perasuransian yang memilki bidang usaha yang sama	**Tidak**	**Ya**
2.	**Kemampuan dan Integritas Dewan Komisaris**		
2.1.	Memenuhi persyaratan Fit and Proper Test	**Tidak**	**Ya**
2.2.	Mematuhi dan memahami Anggaran Dasar Perusahaan	**A B C D E**	
2.3.	Mematuhi dan melaksanakan GCG	**A B C D E**	
2.4.	Tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya atau pihak lain yang dapat merugikan perusahaan	**Tidak**	**Ya**
3.	**Kemampuan dan Integritas DPS**		
3.1.	Mendapatkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional?	**Tidak**	**Ya**
3.2.	DPS telah mendapat persetujuan dari OJK	**Tidak**	**Ya**
3.3.	Mematuhi dan memahami Anggaran Dasar Perusahaan	**Tidak**	**Ya**
3.4.	Mematuhi dan melaksanakan GCG	**Tidak**	**Ya**
3.5.	Tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya atau pihak lain yang dapat merugikan perusahaan	**Tidak**	**Ya**
3.6.	50% atau lebih anggota DPS berkewarganegaraan Indonesia	**Tidak**	**Ya**

4. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

4.1.	Dewan Komisaris mengawasi kepengurusan Perusahaan oleh Direksi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.2.	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.3.	Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi pada Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.4.	Dewan Komisaris memperoleh informasi tentang Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.5.	Dewan Komisaris memiliki Tata Tertib dan Pedoman Kerja (*charter*)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.6.	Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.7.	Dewan Komisaris melaporkan tanggung jawab pengawasannya dan mendapatkan acquit et decharge dari RUPS	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.8.	Dewan Komisaris mengadakan rapat secara berkala	**Tidak**			**Ya**	
4.9.	Setiap rapat Dewan Komisaris dibuat risalah rapat	**Tidak**			**Ya**	
4.10.	Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan keputusan yang diambil dalam rapat (bila ada)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.11.	Setiap anggota Dewan Komisaris baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima risalah rapat Dewan Komisaris	**Tidak**			**Ya**	

5. Fungsi Pengawasan Dewan Syariah

5.1.	Informasi yang diberikan oleh Direksi kepada DPS disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	**Tidak**	**Ya**
5.2.	DPS melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dan saran terhadap kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip Syariah	**Tidak**	**Ya**
5.3.	DPS mengadakan rapat secara berkala	**Tidak**	**Ya**
5.4.	Setiap rapat DPS dibuat risalah rapat	**Tidak**	**Ya**
5.5.	Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting opinions) dengan keputusan yang diambil dalam rapat	**Tidak**	**Ya**
5.6.	Setiap anggota DPS baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima risalah rapat DPS	**Tidak**	**Ya**

6. Komite-Komite Dewan Komisaris (dijawab jika ada)

6.1. Komite Audit — **Tidak Ada** — **lanjutkan ke 4.1.8.**

6.1.1.	Struktur pengendalian internal Perusahaan dilaksanakan dengan baik	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.1.2.	Audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

6.1.3.	Tindaklanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.1.4.	Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	**Tidak**			**Ya**	
6.1.5.	Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.1.6.	Meningkatnya kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.1.7.	Anggota Komite Audit terdiri dari :					
	a. seorang Komisaris Independen sebagai Ketua	**Tidak**			**Ya**	
	b. anggota Dewan Komisaris	**Tidak**			**Ya**	
	c. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman, serta kualitas lain yang diperlukan	**Tidak**			**Ya**	

6.1.8. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Audit, maka terdapat anggota komisaris yang secara khusus bertugas untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

a. Struktur pengendalian internal Perusahaan telah dapat dilaksanakan dengan baik	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
b. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
c. Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh Manajemen	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
d. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	**Tidak**				**Ya**
e. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh Manajemen	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

	f. Meningkatnya kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

6.2. Komite Pemantau Risiko

Tidak Ada — **lanjutkan ke 4.2.4.**

Komite Pemantau Risiko bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut ini:

6.2.1.	Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.2.2.	Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.2.3.	Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari:					
	a. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan Komisaris Independen;	**Tidak**				**Ya**
	b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang	**Tidak**				**Ya**

	manajemen risiko dan/atau aktuaria; dan c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian	**Tidak**	**Ya**

6.3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Tidak Ada	**Tidak lanjutkan ke 4.2.11.**

Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut ini:

6.3.1.	Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.3.2.	Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.3.3.	Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

	nominasi bagi pejabat senior Perusahaan					
6.3.4.	Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.3.5.	Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih anggota direksi sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.3.6.	Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Komisaris	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.3.7.	Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.3.8.	Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

	mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris	
6.3.9.	Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi	**A B C D E**
6.3.10.	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:	
	a. anggota Dewan Komisaris	**Tidak** / **Ya**
	b. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian,pengalaman dan kualitas lain yang diperlukan	**Tidak** / **Ya**
6.3.11.	Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Nominasi dan remunerasi, terdapat anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut :	
	a. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris	**A B C D E**
	b. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada	**A B C D E**

RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi

c. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan. **A B C D E**

d. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. **A B C D E**

e. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih anggota direksi sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. **A B C D E**

f. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada **A B C D E**

RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Komisaris

g. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi. **A B C D E**

h. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris **A B C D E**

i. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi **A B C D E**

6.4. Komite Kebijakan Corporate Governance **Tidak Ada** **lanjutkan ke 4.4.4.**

Komite Kebijakan Corporate Governance (yang berdiri sendiri maupun yang tergabung dalam Komite Nominasi dan Remunerasi) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut:

6.4.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG **A B C D E**

	secara menyeluruh yang disusun Direksi					
6.4.2.	Menilai kesesuaian penerapan GCG di Perusahaan terhadap kebijakan GCG yang disusun Direksi, termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

6.4.3. Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari:

a. Anggota Dewan Komisaris	**Tidak**	**Ya**
b. Pihak luar yang independen yang mempunyai keahlian, pengalaman dan kualitas di bidang corporate governance	**Tidak**	**Ya**

6.4.4. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Kebijakan Corporate Governance, terdapat anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun Direksi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
b. Menilai kesesuaian penerapan GCG di Perusahaan terhadap	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

	kebijakan GCG yang disusun Direksi, termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR		

7. Komisaris Independen

Perusahaan memiliki Komisaris Independen dengan kriteria-kriteria berikut ini :

7.1.	Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Pemegang Saham pengendali Perusahaan	**Tidak**	**Ya**
7.2.	Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Direktur Perusahaan	**Tidak**	**Ya**
7.3.	Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Komisaris lainnya	**Tidak**	**Ya**
7.4.	Tidak pernah menduduki jabatan Eksekutif pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir	**Tidak**	**Ya**
7.5.	Tidak menduduki jabatan eksekutif di Perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis dengan Perusahaan	**Tidak**	**Ya**
7.6.	Tidak pernah menduduki jabatan Eksekutif pada Perusahaan lain yang terafiliasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir	**Tidak**	**Ya**
7.7.	Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada Perusahaan dan perusahaan -perusahaan lain yang terafiliasi	**Tidak**	**Ya**
7.8.	Tidak menjadi pemasok signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pemasok	**Tidak**	**Ya**

7.9.	Tidak menjadi pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pelanggan signifikan dari Perusahaan	**Tidak**			**Ya**	
7.10.	Tidak menjadi pemasok signifikan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pemasok dari Perusahaan yang terafiliasi	**Tidak**			**Ya**	
7.11.	Tidak menjadi pelanggan signifikan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi atau menduduki jabatan eksekutif dan Komisaris Perusahaan pelanggan dari Perusahaan yang terafiliasi	**Tidak**			**Ya**	
7.12.	Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan lain dengan perusahaan yang dapat diintepretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan Perusahaan	**Tidak**			**Ya**	
7.13.	Memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
7.14.	Memahami Undang-Undang Perasuransian serta peraturan pelaksanaannya	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
7.15.	Tidak bekerja rangkap sebagai Komisaris, Direktur, dan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memiliki bidang usaha yang sama	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

D. Direksi

1. Komposisi Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

1.1.	Direksi terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi *)seperti :		
	a. Bidang Asuransi	**Tidak**	**Ya**

	b. Bidang Keuangan	**Tidak**	**Ya**
	c. Bidang Manajemen	**Tidak**	**Ya**
1.2.	Domisili Anggota Direksi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif.	**Tidak**	**Ya**
1.3.	Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui mekanisme yang transparan	**Tidak**	**Ya**
2.	**Persyaratan Anggota Direksi**		
2.1.	Anggota Direksi memenuhi ketentuan anggaran dasar	**Tidak**	**Ya**
2.2.	Anggota Direksi memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan otoritas pembina dan pengawas	**Tidak**	**Ya**
2.3.	Anggota Direksi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perusahaan	**A**	**B** **C** **D** **E**
2.4.	Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan GCG	**A**	**B** **C** **D** **E**
2.5.	Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan atau pihak lain yang merugikan kepentingan perusahaan	**Tidak**	**Ya**
2.6.	Direktur Utama tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Perasuransian dengan bidang usaha yang berbeda	**Tidak**	**Ya**
2.7.	Selain Direktur Utama tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Perasuransian dengan bidang usaha yang berbeda yang bukan merupakan Perusahaan anak	**Tidak**	**Ya**

2.8.	Direksi tidak merangkap jabatan pada perusahaan yang bukan Perusahaan Perasuransian	**Tidak**				**Ya**
3.	**Fungsi Direksi**					
3.1.	**Kepengurusan**					
3.1.1.	Direksi menyusun Visi, Misi dan Nilai2 Perusahaan serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.1.2.	Direksi mengelola sumber daya yang dimiliki , secara efektif dan efisien, termasuk memastikan dimilikinya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk menjalankan fungsinya	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.1.3.	Direksi memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.1.4.	Direksi membentuk Komite untuk mendukung pelaksanaan tugasnya	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

3.1.5.	Direksi memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoman kerja (*charter*)	**A B C D E**	
3.2. Manajemen Risiko			
3.2.1.	Direksi menyusun dan melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan	**A B C D E**	
3.2.2.	Perusahaan memiliki Komite Kebijakan Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	**Tidak**	**Ya**
3.3. Pengendalian Internal			
3.3.1.	Perusahaan memiliki fungsi pengawasan internal	**Tidak**	**Ya**
3.3.2.	Bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan internal	**Tidak**	**Ya**
3.3.3.	Menembuskan laporannya kepada Dewan Komisaris/Komite Audit.	**Tidak**	**Ya**

3.3.4.	Kepala Satuan Kerja Auditor Internal diangkat Direksi, berdasarkan kriteria yang jelas	**Tidak**				**Ya**	
3.3.5.	Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Auditor Internal mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris	**Tidak**				**Ya**	
3.3.6.	Satuan Kerja Auditor Internal bertugas untuk memastikan sistem pengendalian internal berfungsi secara efektif dan efisien	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	
3.3.7.	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	
3.3.8.	Memastikan Sistem Pengendalian Internal berfungsi secara efektif dan efisien	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	
3.3.9.	Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	
3.3.10.	Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan,	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	

		pelaksanaan GCG dan peraturan Perusahaan						
	3.3.11.	Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	
3.4. Komunikasi								
	3.4.1.	Perusahaan memiliki Sekretaris Perusahaan yang melaksanakan komunikasi antara Perusahaan dengan stakeholders	**Tidak Ada lanjutkan ke 3.4.2** **Ya**					**Ya**
	3.4.2.	Dalam hal kompleksitas Perusahaan belum mengharuskan diangkatnya Sekretaris Perusahaan, maka fungsi komunikasi dijabat oleh salah seorang anggota Direksi	**Tidak**					**Ya**
	3.4.3.	Sekretaris Perusahaan harus mampu :						
		a. Memastikan Perusahaan telah memenuhi ketentuan penyampaian informasi sesuai	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	

		peraturan perundang-undangan b. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan atas setiap informasi relevan yang dibutuhkan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
	3.4.4.	Laporan Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris	**Tidak**			**Ya**	
	3.4.5.	Sekretaris Perusahaan melaksanakan fungsi untuk menjamin kepatuhan pada peraturan perundangan dalam hal Perusahaan tidak memiliki satuan kerja kepatuhan (*compliance committee*) tersendiri.	**Tidak**			**Ya**	
3.5. Aktuaria							
	3.5.1.	Perusahaan memiliki Aktuaris yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut a. Aktuaris yang ditunjuk memiliki kualifikasi dan	**Tidak**			**Ya**	

		standar sesuai yang ditetapkan yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Lembaga Profesi Aktuaris.					
		b. Aktuaris Perusahaan memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.	**Tidak**				**Ya**
		c. Aktuaris yang ditunjuk dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada standar praktik dan kode etik profesi yang berlaku.	**Tidak**				**Ya**
	3.5.2.	Perusahaan harus menunjuk perusahaan konsultan aktuaria untuk melakukan evaluasi kewajiban Perusahaan	**Tidak**				**Ya**
3.6.	**Investasi**						
	3.6.1.	Investasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan hasil yang optimal, mudah dicairkan dan aman bagi Perusahaan.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

3.6.2.	Perusahaan memiliki Komite Investasi untuk membantu Direksi	**Tidak**				**Ya**	
3.6.3.	Komite Investasi menjalankan tugas secara obyektif berdasarkan arahan Direksi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	
3.6.4.	Komite Investasi membantu Direksi dalam menilai dan menetapkan strategi investasi yang direncanakan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	
3.6.5.	Komite Investasi membantu Direksi dalam menjaga likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	
3.6.6.	Perusahaan memiliki fungsi pengelolaan Investasi	**Tidak**				**Ya**	
3.7. Pemasaran							
3.7.1.	Perusahaan memiliki Program Promosi (*media plan*) yang intinya mengungkapkan informasi yang jelas dan relevan, tidak	**Tidak**				**Ya**	

	menyesatkan serta mematuhi kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku		
3.7.2.	Perusahaan menerbitkan brosur yang memuat penjelasan lengkap dan jelas tentang produk yang dijual ke masyarakat luas	**Tidak**	**Ya**
3.7.3.	Perusahaan memiliki agen dan sistem keagenan	**Tidak**	**Ya**
3.7.4.	Perusahaan memilki kontrak keagenan yang baku	**Tidak**	**Ya**
3.7.5.	Perusahaan memastikan bahwa seluruh agen wajib memiliki sertifikasi keagenan dan pelatihan seperti yang dipersyaratkan	**A B C D E**	
3.7.6.	Perusahaan memilki dan menerapkan Kode Etik Keagenan dalam pemasaran produknya	**Tidak**	**Ya**
3.7.7.	Perusahaan memiliki kerjasama dengan broker asuransi	**Tidak**	**Ya**
3.7.8.	Perusahaan telah memanfaatkan media elektronik untuk	**Tidak**	**Ya**

		melaksanakan kegiatan pemasaran.	

3.8. Teknologi Informasi (TI)

3.8.1.	Perusahaan memiliki sistem komputerisasi administrasi secara terpadu	**A B C D E**	
3.8.2.	Perusahaan memilki sistem komputerisasi untuk menghitung besarnya akumulasi risiko dan cadangan teknis.	**A B C D E**	
3.8.3.	Perusahaan memiliki unit khusus untuk menangani TI yang berdiri sendiri dibawah supervisi seorang Direktur	**Tidak**	**Ya**
3.8.4.	Perusahaan memiliki Standard Operating Procedures untuk bagian TI	**A B C D E**	
3.8.5.	Perusahaan melakukan audit TI secara berkala	**Tidak**	**Ya**
3.8.6.	Perusahaan memiliki pengaturan tanggung jawab yang jelas atas penggunaan Teknologi Informasi.	**A B C D E**	

3.9.	**Tanggung Jawab Sosial**					
	3.9.1.	Perusahaan mempunyai program tanggung jawab sosial secara berkelanjutan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
	3.9.2.	Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial disampaikan Direksi dalam Laporan Tahunan	**Tidak**			**Ya**	
4.	**Pertanggungjawaban Direksi**						
	4.1.	Direksi menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan dalam bentuk Laporan Tahunan	**Tidak**			**Ya**	
	4.2.	Kriteria Laporan Tahunan antara lain :					
		4.2.1 Memuat sekurang-kurangnya :					
		a. Laporan keuangan	**Tidak**			**Ya**	
		b. Laporan kegiatan Perusahaan	**Tidak**			**Ya**	
		c. Laporan pelaksanaan GCG	**Tidak**			**Ya**	
		4.2.2. Mendapat persetujuan RUPS	**Tidak**			**Ya**	
		4.2.3. Khusus laporan keuangan harus mendapat pengesahan RUPS	**Tidak**			**Ya**	
		4.2.4. Harus tersedia sebelum RUPS dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga Pemegang	**Tidak**			**Ya**	

		Saham dapat melakukan penilaian						
4.3.	Rapat Direksi							
	4.3.1	Direksi mengadakan rapat secara berkala	**Tidak**					**Ya**
	4.3.2.	Direksi menetapkan tata tertib rapat	**Tidak**					**Ya**
	4.3.3.	Setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat	**Tidak**					**Ya**
	4.3.4.	Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan keputusan yang diambil dalam rapat (bila ada)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	
	4.3.5.	Setiap anggota Direksi baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima Risalah Rapat Direksi	**Tidak**					**Ya**

PEMEGANG SAHAM

1.	**Persyaratan Pemegang Saham**		
1.1.	Pemegang Saham pengendali setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan	**Tidak**	**Ya**
1.2.	Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap saat apabila Pemegang Saham pengendali tersebut patut diduga tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan kemampuan dan kepatutan berdasarkan hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan atau pengaduan	**Tidak**	**Ya**
1.3.	PSP tidak menjadi PSP pada 1 (satu) Perusahaan lain yang merupakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki bidang usaha yang sama	**Tidak**	**Ya**
2.	**Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham**		
2.1.	Perusahaan menjamin hak-hak Pemegang Saham, sehingga Pemegang Saham dapat menggunakannya berdasarkan prosedur yang benar	**Tidak**	**Ya**
2.2.	Apakah hak-hak Pemegang Saham yang dijamin oleh Perusahaan meliputi namun tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:		
	a. Hak untuk hadir dalam RUPS	**Tidak**	**Ya**
	b. Hak untuk memberikan suara dalam suatu RUPS	**Tidak**	**Ya**
	c. Hak untuk memperoleh informasi material secara tepat waktu	**Tidak**	**Ya**
	d. Hak untuk memperoleh informasi material secara teratur	**Tidak**	**Ya**
	e. Hak untuk menerima sebagian dari laba yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya	**Tidak**	**Ya**
3.	**Kewajiban Pemegang Saham**		

3.1.	Pemegang Saham mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.2.	Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan pengawasan Perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.3.	Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan kepengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.4.	Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat di industri perasuransian	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.5.	Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan keluarga dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.6.	Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dengan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.7.	Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.8.	Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris melalui mekanisme RUPS	**Tidak**			**Ya**	

3.9.	Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Direksi melalui mekanisme RUPS	**Tidak**				**Ya**
4.	**Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham**					
4.1.	Perusahaan melindungi hak pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan lainnya	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.2.	Perusahaan menyelenggarakan daftar pemegang saham sesuai anggaran dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.3.	Perusahaan menyediakan informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.4.	Perusahan tidak memihak pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan ke pemegang saham lainnya	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.5.	Perusahaan memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

II. PEMANGKU KEPENTINGAN

A. Pemegang Polis

1. Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan:

1.1.	Kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis.		**Tidak**		**Ya**	
1.2.	Perlindungan kepentingan pemegang polis.		**Tidak**		**Ya**	
1.3.	Perlindungan kerahasiaan pemegang polis.		**Tidak**		**Ya**	
1.4.	Evaluasi kebutuhan pemegang polis.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.5.	Pengungkapan informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.6.	Pelayanan terhadap pemegang polis berdasarkan prinsip utmost good faith dengan integritas dan kompetensi yang tinggi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.7.	Penunjukan adjuster bersama-sama pemegang polis bila diperlukan.		**Tidak**		**Ya**	

2. Perusahaan memastikan bahwa pemegang polis

2.1.	Menyampaikan informasi kepada Perusahaan secara jujur terkait data tertanggung dan obyek risiko		**Tidak**		**Ya**	
2.2.	Membayar premi tepat waktu		**Tidak**		**Ya**	
2.3.	Melaporkan klaim ke Perusahaan sesuai prosedur		**Tidak**		**Ya**	
2.4.	Memberi kesempatan untuk melakukan survey dan bekerjasama dengan adjuster		**Tidak**		**Ya**	

B. Pegawai

1. Pegawai harus memenuhi dan melaksanakan :

1.1.	Penerimaan pegawai atas dasar kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait sifat pekerjaan secara taat azas	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

1.2.	Hal-hal berikut secara obyektif tanpa membedakan SARA, jenis kelamin dan kondisi fisik seseorang :					
1.2.1.	Pola penetapan remunerasi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.2.2.	Mengikutsertakan dalam pelatihan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.2.3.	Penetapan jenjang karir	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.2.4.	Penetapan persyaratan kerja	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.3.	Mempunyai peraturan tertulis yang mengatur pola rekrutmen serta hak dan kewajiban pegawai	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.4.	Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.5.	Menyediakan sarana komunikasi untuk penyampaian informasi bagi pegawai	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.6.	Memberikan peluang kepada pegawai untuk membentuk Serikat Pekerja dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.	Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan :					
2.1.	Kewajiban sebagaimana diatur jelas dalam peraturan Perusahaan dan atau Perjanjian Kerja Bersama	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.2.	Larangan untuk tidak menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik Perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.3.	Hak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai lingkungan kerja dan kesejahteraan pegawai	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

2.4.	Pelaporan pelanggaran atas Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku serta peraturan perundangan yang terkait dengan Perusahaan dengan hak mendapat perlindungan sebagai pelapor.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

C. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Lain

1.	Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi melakukan persaingan usaha secara sehat	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.	Dalam hal terjadi hubungan bisnis, para pihak harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang meliputi namun tidak terbatas pada :					
2.1.	Ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.2.	Pengungkapan dan penyampaian informasi dan data yang relevan dan akurat	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.3.	Pelaksanaan komitmen dalam memenuhi kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian dan peraturan perundangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.	Perusahaan memiliki *coverage* otomatis dari perusahaan reasuransi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.	Perusahaan memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko yang besarnya didasarkan atas modal sendiri (ekuitas) dan profil risiko yang bersangkutan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.	Setiap penutupan reasuransi yang bersifat otomatis (*treaty*) didasarkan pada perjanjian yang disepakati oleh perusahaan dan perusahaan reasuransi yang bersangkutan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

D. Perusahaan Penunjang

1. Hubungan dengan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi

Dalam hubungan dengan pialang asuransi dan pialang reasuransi, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1.1.	Perusahaan melaksanakan akseptasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan menyelesaikan klaim sesuai perjanjian	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.2.	Perusahaan memastikan bahwa pialang:					
1.2.1.	memiliki ijin usaha dari otoritas dan kompetensi yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari lembaga profesi pialang	**Tidak**		**Ya**		
1.2.2.	menyampaikan semua informasi yang relevan kepada Perusahaan secara benar, jujur dan lengkap	**Tidak**		**Ya**		
1.2.3.	melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan	**Tidak**		**Ya**		

2. Hubungan dengan Penilai Kerugian Asuransi

Dalam berhubungan dengan penilai kerugian asuransi (adjuster), Perusahaan berpedoman pada hak-hak sebagai berikut:

2.1.	Perusahaan harus mengungkapkan informasi tentang kondisi polis dan memberikan data secara lengkap dan akurat berkaitan dengan terjadinya suatu klaim	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.2	Perusahaan memastikan bahwa penilai kerugian:					
2.2.1.	Mengetahui dan memahami persyaratan polis yang diperjanjikan antara Perusahaan dengan pemegang polis	**Tidak**			**Ya**	

2.2.2.	Menggunakan persyaratan dan kondisi polis sebagai dasar untuk menentukan dijamin atau tidaknya kerugian yang terjadi	**Tidak**	**Ya**
2.2.3.	Mengambil kesimpulan atas pemeriksaaan dan penelitian secara kompeten dan independen mewakili kepentingan Perusahaan dan pemegang polis	**Tidak**	**Ya**
2.2.4.	Mengungkapkan semua informasi yang penting mengenai terjadinya kerugian dan penyebabnya, sesuai fakta yang diketahui secara wajar tanpa berpihak ke kedua belah pihak	**Tidak**	**Ya**
2.2.5.	Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan	**Tidak**	**Ya**

3. Hubungan dengan Konsultan Aktuaria

Dalam berhubungan dengan konsultan aktuaria, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

3.1.	Perusahaan mengungkapkan data dan informasi yang akurat sebagaimana diperlukan oleh konsultan aktuaria dalam melaksanakan tugasnya serta melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.2	Perusahaan memastikan konsultan aktuaria yang ditunjuk:					
3.2.1.	Memiliki integritas dan reputasi yang baik dan diakui lembaga yang berwenang	**Tidak**				**Ya**
3.2.2.	Independen terhadap Perusahaan dan bebas dari kepentingan pemegang saham	**Tidak**				**Ya**
3.2.3.	Membuat laporan dan rekomendasi kepada Direksi berdasarkan standar praktek dan kode etik profesi yang berlaku	**Tidak**				**Ya**

3.2.4.	Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan	**Tidak**				**Ya**

4. Hubungan dengan Agen Asuransi

Dalam berhubungan dengan agen asuransi, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

		A	B	C	D	E
4.1.	Perusahaan melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian keagenan					
4.2.	Mencantumkan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi asuransi yang bersangkutan dalam perjanjian keagenan berikut sangsi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran	**Tidak**			**Ya**	
4.3.	Memastikan bahwa agen yang ditunjuk:					
4.3.1.	Kompeten dalam mewakili Perusahaan dalam menjual produk dan memberikan pelayanan asuransi yang dibuktikan dari adanya sertifikat dari lembaga yang berwenang	**Tidak**			**Ya**	
4.3.2.	Menerima pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dari Perusahaan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya	**Tidak**			**Ya**	
4.3.3.	Menandatangani, melaksanakan dan mematuhi perjanjian keagenan dengan Perusahaan	**Tidak**			**Ya**	
4.3.4.	Melaksanakan pembayaran premi pemegang polis kepada Perusahaan sesuai perjanjian	**Tidak**			**Ya**	
4.3.5	Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perjanjian	**Tidak**			**Ya**	
4.4.	Perusahaan menyediakan alat bantu pengawasan, meliputi namun tidak terbatas pada:					

4.4.1.	Mewajibkan semua Agen untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka telah membaca dan memahami kode etik yang berlaku.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.4.2.	Membentuk sales *compliance department* yang terkait dengan penjualan produk, langsung di bawah pengawasan salah seorang Direktur	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.4.3.	Mewajibkan sales *compliance department* memberikan laporan secara berkala kepada Direksi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.4.4.	Direksi wajib melaporkan kepada asosiasi terkait setiap pelanggaran kode etik yang terjadi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

5. Mitra Bisnis

Mitra Bisnis adalah pemasok, distributor, kreditor, debitur, dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan perusahaan

Dalam hubungan dengan mitra bisnis, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

5.1.	Memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.2.	Memastikan bahwa Perusahaan dan mitra bisnis:					
5.2.1.	Saling memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis yang dilakukan, sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar	**Tidak**			**Ya**	

5.2.2.	Saling merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak, kecuali dipersyaratkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan	**Tidak**	**Ya**
5.2.3.	Saling melaksanakan hubungan kerja sesuai nilai-nilai etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan	**Tidak**	**Ya**

6. Masyarakat

Dalam berhubungan dengan masyarakat, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

6.1.	Memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya keselarasan hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat, termasuk program kemitraan dan bina lingkungan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.2.	Perusahaan bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan Perusahaan terhadap masyarakat	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

PRAKTIK-PRAKTIK USAHA YANG SEHAT

A. Underwriting

1.	Perusahaan memiliki kebijakan *underwriting* yang dituangkan secara rinci dalam Pedoman *Underwriting*	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.	Pedoman *Underwriting* memuat kebijakan teknis akseptasi, batasan kewenangan untuk setiap *underwriter*, *pricing* serta kapasitas pertanggungan asuransi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.	Dalam melakukan underwriting yang prudent, Perusahaan:					
3.1.	Menerapkan prinsip-prinsip dasar asuransi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.2.	Memperhatikan faktor-faktor yang mendukung proses pelaksanaannya, seperti: survey risiko, penentuan tarif premi dan penentuan nilai pertanggungan.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.3.	Mematuhi peraturan perundang-undangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.	Perlindungan (*coverage*) yang diberikan oleh Perusahaan harus jelas dan mudah dipahami untuk mencegah terjadinya dispute di kemudian hari serta memberi manfaat sebagaimana yang dibutuhkan oleh pemegang polis.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

B. Klaim

1.	Perusahaan menginformasikan kepada pemegang polis tentang tata cara penyelesaian klaim asuransi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.	Memastikan Perusahaan mendapatkan informasi tentang tata cara dan persyaratan pengajuan klaim reasuransi oleh	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.	Perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi yang terkait dengan pertanggungan ulang yang dilakukan Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

4.	Perusahaan menggunakan jasa penilai kerugian (*adjuster*) independen apabila diperlukan	**Tidak**			**Ya**	
5.	Kebijakan penanganan klaim dituangkan secara rinci dalam Pedoman Penyelesaian Klaim Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.	Perusahaan mengupayakan penyelesaian klaim secara cepat dan pembayaran tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
C.	**Reasuransi dan retrosesi**					
1.	Perusahaan melakukan pertanggungan ulang (reasuransi/retrosesi) untuk risiko yang melebihi atau di luar batas kemampuan Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.	Pelaksanaan reasuransi/retrosesi didasarkan pada kesepakatan tertulis antara Perusahaan dengan penanggung ulang, baik yang bersifat fakultatif maupun *treaty*	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
D.	**Kepatuhan**					
1.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan	**Tidak**			**Ya**	
2.	Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (*compliance*) terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.	Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.	Direksi bertugas untuk melakukan fungsi kepatuhan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

5.	Dewan Komisaris memonitor pelaksanaan fungsi kepatuhan melalui Komite Pemantau Risiko atau Komite Kepatuhan yang khusus dibentuk	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.	Informasi mengenai ketidakpatuhan berupa penyimpangan-penyimpangan dan atau kecurangan-kecurangan yang terjadi ditampung melalui mekanisme Sistem Pelaporan pelanggaran	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
7.	Perusahaan memiliki Direktur Kepatuhan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
8.	Direktur yang membawahi fungsi teknik kepatuhan tidak merangkap teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

E. Manajemen Risiko

1.	Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko	**Tidak**	**Ya**
2.	Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang menjabarkan prinsip-prinsip utama dan penetapan tanggung jawab diantara semua aspek kegiatan yang meliputi:		

2.1.	Sistem yang efisien dalam mengidentifikasi, menilai, mengukur, mengendalikan, mengurangi, dan memonitor risiko	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.2.	Strategi dan kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memastikan dipenuhinya kebijakan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.3.	Sistem Pengendalian internal yang memadai untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat dilaksanakan dengan baik	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.4.	Tenaga pelaksana Manajemen Risiko yang berintegritas tinggi, kompeten, berpengalaman, memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

3.	Perusahaan mengembangkan kerangka dasar strategi Asset and *Liability Management* (ALM) yang dilaksanakan pada komite tingkat Direksi. Tugas penting dari Komite tersebut adalah membahas produk baru yang akan dipasarkan oleh Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.	Perusahaan melaksanakan *Stress Test* terkait risiko dalam memenuhi persyaratan solvabilitas, termasuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan, seperti Perubahan kondisi ekonomi, yang dapat berdampak pada keadaan keuangan Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.	Perusahaan mengembangkan *Contingency Plans* khususnya untuk menanggulangi risiko-risiko yang diyakini bisa terjadi, seperti bencana alam, serangan teroris, kegagalan sistem teknologi informasi, kekosongan Direksi atau posisi manajemen kunci. Penyusunan *Contingency Plans* dilakukan melalui pendekatan yang berkesinambungan dan dikomunikasikan kepada karyawan melalui training	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

F. Audit Internal

Perusahaan memiliki satuan kerja yang melaksanakan fungsi auditor internal. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, auditor internal harus :

1.	Menyusun dan melaksanakan rencana audit dalam rangka menguji dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari sistem yang dimiliki Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.	Mengaudit semua area kegiatan yang mengandung risiko cukup material diaudit dalam jangka waktu yang memadai	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.	Menerbitkan laporan temuan dan rekomendasi berdasar hasil audit kepada Manajemen	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

4.	Melaporkan hasil audit dan temuan yang signifikan ke Direksi dan Dewan Komisaris	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.	Melaporkan kecukupan fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan fungsi pengendalian lainnya kepada manajemen.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.	Rencana audit dibahas dengan komite audit dan disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

G. Auditor Eksternal

1.	Auditor Eksternal (kantor akuntan publik) melakukan pemeriksaaan secara independen terhadap kebenaran laporan yang disajikan oleh Direksi	**Tidak**	**Ya**
2.	Kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	**Tidak**	**Ya**
3.	Penunjukan KAP diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS	**Tidak**	**Ya**
4.	Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Komisaris	**Tidak**	**Ya**
5.	Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Direksi	**Tidak**	**Ya**
6.	Auditor Eksternal bebas dari pengaruh pihak yang berkepentingan lainnya di Perusahaan	**Tidak**	**Ya**
7.	Auditor Eksternal memiliki akses atas semua catatan akuntansi	**Tidak**	**Ya**
8.	Auditor Eksternal memiliki akses atas semua data penunjang yang diperlukan	**Tidak**	**Ya**
9.	Auditor Eksternal tidak memberikan jasa lain selain jasa audit	**Tidak**	**Ya**
10.	Penunjukan KAP diusulkan oleh komite audit kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS	**Tidak**	**Ya**

H. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

1.	Perusahaan mempunyai mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran yang mencatat setiap pelanggaran yang membahayakan kepentingan perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.	Penanggung jawab sistem pelaporan pelanggaran menyampaikan laporan pelanggaran kepada Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.	Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat melindungi Pelapor	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.	Penanggung jawab Sistem Pelaporan Pelanggaran segera menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh Pelapor	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

I. Aktuaris Perusahaan

1.	Perusahaan memiliki aktuaris Perusahaan yang bertindak independen	**Tidak langsung ke VI**	**Ya**
2	Aktuaris wajib memberikan saran secara profesional kepada Direksi terkait:		
2.1.	Pendapat tentang ketetapan teknis yang terkait kerangka evaluasi yang disiapkan perusahaan	**A B C D E**	
2.2.	Identifikasi dan estimasi risiko utama dan manajemen risiko yang tepat	**A B C D E**	
2.3.	Menilai manajemen risiko	**A B C D E**	
2.4.	Testing kondisi keuangan	**A B C D E**	
2.5.	Strategi investasi dan manajemen kekayaan-kewajiban	**A B C D E**	
2.6.	Menilai kecukupan modal dari segi peraturan dan ekonomis	**A B C D E**	
2.7.	Kecukupan premi dan nilai tunai	**A B C D E**	
2.8.	*Management participating fund*, termasuk analisa pengaruh utama sebagai akibat strategi dan kebijakan	**A B C D E**	

	2.9. Desain produk, mengurangi risiko dan kewajiban manajemen risiko lainnya	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.	Aktuaris mempunyai akses ke Direksi dan Rapat Direksi yang relevan maupun unit operasional	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.	Aktuaris diberikan wewenang untuk berkomunikasi dengan staf di divisi yang hasil pekerjaannya berkaitan dengan fungsi aktuaris yang ditunjuk	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.	Aktuaris memberikan rekomendasi tentang tarif premi dengan jaminan bahwa penetapan tarif premi tersebut telah sesuai dengan struktur internal	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.	Aktuaris memberikan rekomendasi jumlah dividen bagi pemegang polis untuk dibagikan kepada *participating policyholders*, dengan memperhatikan faktor kewajaran dan keadilan diantara berbagai kelompok pemegang polis	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
7.	Aktuaris dapat memberikan pendapat mengenai cara investasi yang harus dilakukan Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
8.	Perusahaan tidak memberikan tugas lain kepada aktuaris yang dapat menimbulkan benturan kepentingan	**Tidak**			**Ya**	

III. PERNYATAAN PENERAPAN PEDOMAN GCG

1.	Pernyataan tentang Penerapan GCG dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perusahaan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	**Tidak Ada**	**Ya**
2.	Laporan tahunan tersebut harus memuat informasi tentang struktur dan mekanisme kerja organ Perusahaan meliputi:		
	2.1. Nama anggota Dewan Komisaris	**Tidak**	**Ya**
	2.2. Jumlah Rapat yang dilakukan Dewan Komisaris dan daftar hadir	**Tidak**	**Ya**
	2.3. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (*self assessment*) tentang kinerja masing-masing Komisaris	**Tidak**	**Ya**
	2.4. Penjelasan mengenai komite penunjang Dewan Komisaris		
	2.4.1. Nama	**Tidak**	**Ya**
	2.4.2. Uraian Fungsi	**Tidak**	**Ya**
	2.4.3. Mekanisme Kerja	**Tidak**	**Ya**
	2.4.4. Jumlah Rapat	**Tidak**	**Ya**
	2.4.5. Daftar hadir	**Tidak**	**Ya**
	2.4.6. Mekanisme dan kriteria Penilaian Kinerja Komite	**Tidak**	**Ya**
	2.5. Nama Anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	**Tidak**	**Ya**
	2.6. Penjelasan singkat mengenai mekanisme kerja Direksi	**Tidak**	**Ya**
	2.7. Jumlah rapat yang dilakukan Direksi dan Daftar hadir	**Tidak**	**Ya**
	2.8. Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal, termasuk sistem pengendalian risiko dan sistem pengawasan dan audit internal.	**Tidak**	**Ya**
	2.9. Informasi lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG, meliputi:		
	2.9.1. Visi, Misi dan Nilai Perusahaan	**Tidak**	**Ya**

2.9.2.	Pemegang Saham pengendali	**Tidak**	**Ya**
2.9.3.	Kebijakan dan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	**Tidak**	**Ya**
2.9.4.	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan	**Tidak**	**Ya**
2.9.5.	Hasil penilaian penerapan GCG yang dilaporkan dalam RUPS Tahunan	**Tidak**	**Ya**
2.9.6.	Kejadian luar biasa yang dialami Perusahaan dan berpengaruh pada kinerja Perusahaan	**Tidak**	**Ya**

6. Rencana Tindak (*Action Plan*)

No.	Tindakan korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
dst.				